

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Tinjauan Teori

##### 2.1.1. Agency Theory

Dalam suatu organisasi membutuhkan pembagian fungsi tugas yang jelas. Hal ini bertujuan agar menghindari terjadinya kebingungan terkait tanggung jawab tugas yang ada. Pembagian tugas juga membuat pekerjaan yang dilakukan dapat lebih maksimal. Di perusahaan contohnya, diperlukan pembagian fungsi lini tugas baik itu dari manajemen lini atas sampai manajemen lini bawah. Fungsi pembagian lini tugas tersebut menjadi jembatan yang menghubungkan manajemen *top level* dengan manajemen *lower level*. *Top level* manajemen di dalam sebuah perusahaan, ditunjuk dan dipilih langsung oleh para pemegang saham (*shareholder*). Tujuannya adalah untuk melaksanakan program kerja perusahaan untuk mencapai tujuan yang ingin diraih perusahaan. Disini para pemegang saham bertindak dari luar perusahaan (*eksternal*) karena memberikan tugasnya kepada *top level* manajemen perusahaan untuk mengatur dan mengelola perusahaan (*internal*). Namun dalam praktik nyata yang ditemukan di lapangan, *top level* manajemen tidak sepenuhnya dapat menjalankan fungsi lini pekerjaannya dalam menjalankan perusahaan. Para pemegang saham terkadang turut ikut campur dalam urusan operasional perusahaan sehingga tidak memberikan keleluasaan bagi *top level* manajemen. *Top level* manajemen mau tidak mau harus mengikuti apa yang diinginkan oleh para *shareholder* meskipun apa yang diminta berbeda dari kacamata manajemen. Perbedaan tersebut tidak jarang menjadi awal terjadinya *conflict of interest* atau konflik kepentingan antara *top level* manajemen dengan para *shareholder*. Konflik ini dikenal juga dengan istilah *agency problem* (Ardini, 2022). Ilmu yang mempelajari terkait hubungan manajemen disebut sebagai *agency theory*.

*Agency theory* atau teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara para pemangku kepentingan sebagai prinsipal bisnis dan

eksekutif perusahaan sebagai agen. *Agency theory* digunakan untuk menyelesaikan masalah konflik kepentingan yang terjadi antara para pemangku kepentingan perusahaan dengan eksekutif perusahaan (Kopp, 2021). Teori keagenan fokus pada masalah yang terjadi saat para pemangku kepentingan memberikan ranah tugas kepada eksekutif. Ada 2 masalah yang menjadi perhatian di dalam teori keagenan; diantaranya hubungan kepentingan yang saling bertentangan (antara para pemegang saham dan eksekutif), dan bagaimana kontrol yang dilakukan para pemegang saham atas apa yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan (Shillemans & Bjurstrom, 2020).

Sejarah mencatat jika permasalahan agensi telah dimulai sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Pada saat itu manusia mulai mengenal praktik bisnis dan mereka melakukan bermacam cara untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat. Setiap perusahaan akan mengalami masalah ini dengan bentuk yang berbeda sehingga masalah ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Masalah agensi telah berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda pula bentuknya. Banyak penelitian terdahulu yang dilakukan terkait masalah agensi. Dari penelitian yang dilakukan memberikan fakta jika masalah agensi dapat terjadi di berbagai bidang. Bidang tersebut; diantaranya akuntansi, keuangan, ekonomi, sosiologi, politik & *science*, pemasaran, *organisational behaviour*, dan masih banyak lagi sehingga membuat masalah agensi ini sangat luas areanya dalam berbagai organisasi (Panda & Leepsa, 2017).

*Agency theory* menggambarkan tindakan manusia yang berpusat pada diri sendiri dan ekstrinsik (Shillemans & Bjurstrom, 2020). Jansen dan Meckling merupakan 2 orang peneliti yang meneliti mengenai masalah agensi pada tahun 1976. Dalam penelitian yang dilakukan mereka terkait masalah agensi, mereka menemukan penyebab permasalahan. Mereka menemukan jika salah satu sifat alami manusia menjadi dalang atau pemicu permasalahan tersebut. Sifat alami tersebut ialah kepentingan diri sendiri sebagai prioritas. Manusia memiliki sifat alami dimana mereka akan lebih mementingkan

kepentingannya dahulu baru memikirkan kepentingan orang lain. Sifat alami tersebut menjadi masuk akal jika konflik kepentingan terjadi karena antara para pemegang saham dengan eksekutif perusahaan mempunyai pemikiran dan tanggapan yang ingin mereka dahulukan. Hubungan mereka mirip seperti kontrak. Kontrak yang dibuat para pemegang saham dengan menunjuk dan memperkerjakan eksekutif untuk melakukan perintah atas nama pemegang saham (Ardini, 2022). Para pemegang saham tentunya memberikan perintah kepada eksekutif untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri mereka. Akan tetapi dalam praktiknya, terkadang perintah yang diberikan tidak sesuai dengan nilai perusahaan sehingga eksekutif menentang hal tersebut yang dirasa dapat membahayakan perusahaan. Di lain sisi eksekutif juga bisa menjadi pihak yang salah dengan melakukan suatu yang menguntungkan dirinya, dan tidak mengikuti apa yang diminta oleh para pemegang saham (Nuswantara et al, 2020).

*Agency theory* dilatar belakangi juga oleh informasi asimetris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informasi asimetris merupakan suatu keadaan yang terjadi dimana salah satu pihak memiliki jumlah informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak yang lain. Masalah agensi dapat datang akibat informasi asimetris yang terjadi antara para pemegang saham dengan eksekutif perusahaan. Eksekutif sebagai orang yang menjalankan operasional perusahaan secara langsung (internal), memiliki pengetahuan akan perusahaan yang lebih mendalam dibanding dengan para pemegang saham yang tidak selalu turut andil dalam operasional perusahaan (eksternal). Kondisi ini terkadang membuat eksekutif dapat membuat keputusan yang menguntungkan bagi dirinya seperti keputusan investasi yang kurang optimal dan pengeluaran tidak perlu yang merugikan perusahaan (Nuswantara et al, 2020). *Agency theory* menjadi salah satu teori yang paling banyak dipakai dalam hal hubungan tata kelola perusahaan (Raimo et al, 2020).

### 2.1.2. Good Corporate Governance

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu tatanan aturan yang mengatur hubungan sistem pengendalian dan kinerja di dalam perusahaan baik itu para pemegang saham, eksekutif, karyawan, dan pihak yang memiliki hubungan baik dalam maupun luar perusahaan terkait hak dan kewajiban mereka terhadap perusahaan. Sederhananya, *Good Corporate Governance* ialah peraturan mengenai hubungan antara para pihak yang berkepentingan di perusahaan untuk dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan kinerja perusahaan. Munculnya *Good Corporate Governance* diakibatkan oleh tugas pemilik perusahaan dan pengendali perusahaan yang berbeda (Lumbanraja, 2021).

Setiap perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik. Semua perusahaan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan laba. Perusahaan manapun pasti ingin agar mereka dapat memaksimalkan laba yang dihasilkan dari perusahaannya. Selain memaksimalkan laba, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menyenangkan para pemegang saham sebagai pihak yang telah memberikan atau menanamkan modalnya di perusahaan. Untuk itu, diperlukan adanya tata kelola perusahaan yang baik agar dapat menjaga hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan perusahaan. *Good Corporate Governance* sendiri memiliki tujuan untuk meminimalisir kemungkinan resiko terjadinya masalah keagenan dengan mengamankan aset perusahaan serta nilai investasi jangka panjang (Irmawati & Riduwan, 2020). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik juga dapat memberikan citra positif perusahaan dimata masyarakat. Selain itu, tata kelola perusahaan dapat mencegah kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat di dalam perusahaan.

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) sendiri telah lahir sejak lama dan bukan karena keharusan adanya GCG di masa sekarang. *Good Corporate Governance* (GCG) berawal dari *Agency Theory* yang

menjelaskan hubungan antara para pemegang saham dengan eksekutif perusahaan. Pada waktu itu sering terjadi masalah kepentingan yang menyebabkan efek negatif pada kinerja perusahaan. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya tatanan peraturan yang dapat memisahkan hubungan tanggung jawab antara kedua belah pihak. *Good Corporate Governance* (GCG) kemudian hadir untuk mengatasi masalah tersebut agar terciptanya kejelasan tatanan di dalam perusahaan. Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) mulai terlihat sekitar tahun 1840 pada perusahaan Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa. Pada waktu itu *Good Corporate Governance* (GCG) dijalankan seperti menjalankan sebuah negara. Tujuannya supaya perusahaan memiliki kinerja yang baik dan dapat menghasilkan laba yang menguntungkan bagi para pemegang saham. Namun pada saat itu *Good Corporate Governance* (GCG) belum seperti sekarang ini dimana masih sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Pihak eksekutif bertindak secara rasional tidak hanya demi kepentingan para pemegang saham, tetapi juga pada manajemen puncak. Hal ini menyebabkan sering terjadinya data atau laporan yang kurang masuk akal. Maka dari itu dibutuhkan sistem *checks and balances* untuk mengurangi hal tersebut.

*Good Corporate Governance* (GCG) dilatar belakangi juga banyaknya kasus-kasus pada perusahaan besar di dunia. Salah satu dampak signifikan dari lemahnya tata kelola perusahaan yaitu terjadinya krisis. Sejarah mencatat jika beberapa krisis besar dunia yang terjadi disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang kurang baik. Krisis global yang terjadi pada tahun 2000 dan tahun 2008 telah memperlihatkan bagaimana dampak daripada tata kelola yang buruk. Krisis tersebut tidak hanya mempengaruhi lingkup ekonomi, namun juga lingkup kepercayaan para investor. Selain itu muncul juga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di sejumlah perusahaan. Peristiwa tersebut menjadi cermin bahwa tata kelola perusahaan belum dilaksanakan secara menyeluruh (Rahmawati, 2022). Di Indonesia sendiri konsep *Good Corporate Governance* (GCG) mulai dikenal setelah Komite Nasional

Kebijakan Governance (KNKG) dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1999 (Fitrianingsih & Asfaro, 2022).

Banyak narasi maupun pendapat yang mengatakan betapa pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memberikan banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan (Kusmayadi et al, 2015). Berikut beberapa manfaat dari *Good Corporate Governance* (GCG).

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mempermudah proses pengambilan keputusan sehingga memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) meminimalisir resiko penyalahgunaan jabatan oleh dewan direksi di dalam perusahaan.
3. Penerapan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mengurangi tindakan kecurangan kinerja dimana nilai fundamental perusahaan tidak terealisasikan.
4. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan minat investor pada nilai perusahaan sehingga perusahaan mendapat dana untuk kepentingan perusahaan. Contohnya, perusahaan dapat melakukan ekspansi.
5. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan nilai saham yang menguntungkan bagi para pemegang saham. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) juga memberikan hal baik bagi negara dengan pajak yang dibayarkan perusahaan secara transparan..
6. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memberikan kepercayaan bagi para *stakeholders*. Kepercayaan ini dapat membuat perusahaan mengurangi biaya yang timbul akibat tuntutan *stakeholders*.

7. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan.

*Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah keagenan yang timbul di dalam perusahaan. Adapun prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Banyak ahli yang berpendapat jika perbaikan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan yang bermasalah itu perlu dilakukan seperti pembentukan komite audit, transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, peningkatan hubungan investor, dan peningkatan kinerja perusahaan melalui pemberian remunerasi. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengartikan GCG sebagai sekumpulan aturan sistematis dalam tatanan perusahaan yang mengandung 5 prinsip dasar yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* (Fitriyani, 2021). Berikut penjelasan mengenai 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG).

a. *Transparency* (Keterbukaan)

Prinsip *Transparency* mengharuskan setiap perusahaan untuk terbuka secara menyeluruh baik itu dari segi informasi, data, kondisi keuangan, sumber daya manusia, dan aspek-aspek lainnya di dalam perusahaan. Prinsip ini menegaskan pentingnya transparansi di sebuah perusahaan agar tercipta budaya lingkungan kerja yang bersih (jujur) dari tindakan atau aksi kejahatan. Prinsip ini juga berarti menekankan agar perusahaan terbuka kepada para pemangku kepentingan yang ada. Tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan informasi yang dimiliki antar kedua belah pihak. Dengan menjalankan prinsip ini, perusahaan tidak hanya menerapkan peraturan yang dianut undang-undang saja terkait permasalahan namun juga dari segi pengambilan keputusan oleh pihak pemegang saham (Lumbanraja, 2021). Kusmayadi et al

(2015) memberikan beberapa contoh penerapan prinsip *Transparency* yang dapat dilakukan perusahaan sebagai berikut.

- 1) Pemegang kepentingan di dalam perusahaan berhak untuk mengamati dan memahami segala proses pengambilan keputusan manajerial pada perusahaan.
- 2) Pemegang saham berhak atas informasi terkait keuangan perusahaan secara *realtime* atau kondisi sekarang.
- 3) Informasi perusahaan terkait kegiatan operasional dikumpulkan oleh tim dan karyawan perusahaan secara terbuka dan tetap menjunjung kerahasiaan nasabah.
- 4) Prosedur dan peraturan kebijakan perusahaan dipublikasikan dan dapat diakses oleh seluruh anggota perusahaan.
- 5) Prinsip keterbukaan dijalankan perusahaan dengan tidak mengurangi kewajiban perusahaan dalam memenuhi aturan kerahasiaan beberapa aspek seperti hak-hak pribadi karyawan.
- 6) Perusahaan memberikan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, jelas, dan tepat waktu serta pemangku kepentingan memperoleh akses untuk informasi tersebut.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip *Accountability* atau akuntabilitas mengharuskan perusahaan dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk tindakan dan kinerja baik kepada pihak perusahaan maupun kepada para investor dengan benar (Fitriyani, 2021). Untuk itu perusahaan perlu menetapkan rincian pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas kepada seluruh karyawan perusahaan. Tujuannya agar peran masing-masing setiap karyawan dapat diketahui dan mudah nantinya untuk pelaporan siapa kepada siapa. Prinsip akuntabilitas juga menekankan perusahaan untuk selalu memastikan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan visi, misi, strategi, dan



tujuan dari perusahaan dengan tidak lupa berpegang pada etika bisnis dan *code of conduct* perusahaan (Kusmayadi et al, 2015).

c. *Responsibility* (Responsibilitas)

Prinsip *Responsibility* mengharuskan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya wajib untuk taat terhadap aturan hukum yang berlaku yaitu peraturan perundang-undangan. Perusahaan juga perlu memperhatikan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Perusahaan hendaknya menghindari biaya yang tidak perlu yang berkemungkinan merugikan perusahaan dan para pemegang saham. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Contoh penerapan pada prinsip *Responsibility* ini sederhananya di dalam perusahaan seluruh anggota perusahaan wajib mengetahui dan memahami seluruh peraturan-peraturan yang ada. Hal ini dilakukan agar setiap bentuk tindakan maupun keputusan yang diambil atau dibuat telah sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Kusmayadi et al, 2015).

d. *Independency* (Independensi)

*Independency* merupakan keadaan dimana keputusan dalam suatu perusahaan dirancang dan dibuat secara professional, mandiri, tanpa tekanan dari pihak lainnya, bebas dari konflik kepentingan, dan secara sehat (Kusmayadi et al, 2015). Prinsip *Independency* mengharuskan perusahaan dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG) bertindak secara independen (Lumbanraja, 2021). Perusahaan diharapkan dapat berkeja secara mandiri sesuai tugas dan kewajiban masing-masing tanpa pengaruh dari pihak manapun. Dengan menjalankan prinsip *Independency*, setiap anggota perusahaan dapat bekerja dengan tidak saling mendominasi satu sama lain yang dapat memberikan dampak buruk pada kinerja perusahaan. Adapun penerapan dari prinsip *Independency* juga membuat perusahaan dalam mengambil suatu

keputusan dilakukan dengan cara yang objektif dan bebas dari upaya intervensi dari pihak manapun (Fitriyani, 2021).

e. *Fariness* (kewajaran atau kesetaraan)

Prinsip *Fariness* mengharuskan perusahaan untuk bertindak secara adil terhadap seluruh anggota perusahaan dan para pemangku kepentingan. Adil dalam pembagian informasi, data, berita, peraturan, pekerjaan, tunjangan, dan lainnya. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota perusahaan yang memiliki kinerja atau performa kerja yang bagus, kompeten, dan berdedikasi tinggi pada perusahaan tanpa pandang agama, suku, ras, jenis kelamin, dan golongan (Fitriyani, 2021). Prinsip ini diterapkan agar dapat menghindari bentuk kecurangan seperti transaksi orang dalam atau *insider trading*, *fraud* (penipuan), KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

### 2.1.3. Independent Board of Commissioners

*Independent Board of Commissioners* atau dewan komisaris independen merupakan komisaris yang berada di luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan langsung dengan direksi atau pemegang saham sehingga bertindak secara netral dan independen (tanpa adanya pengaruh) dalam pengambilan keputusan demi kepentingan perusahaan. Adanya dewan komisaris independen di dalam perusahaan, dapat mengatasi masalah keagenan yang ada di dalam perusahaan karena dewan komisaris ini tidak memiliki keterkaitan atau hubungan seperti halnya pemegang saham dengan eksekutif perusahaan. Selain itu, adanya dewan komisaris independen di suatu perusahaan juga dapat memberikan fungsi pengendalian dan pengawasan manajemen perusahaan (Nugraha et al, 2021). Dewan komisaris independen sebagai bagian inti dari GCG, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan dan akuntabilitas supaya strategi perusahaan tercapai. Dewan komisaris independen melakukan pengawasan kinerja manajer perusahaan apakah mereka telah menjalankan tugasnya dengan benar (Pratama et al, 2020).

Dewan komisaris independen harus bisa bertindak secara netral di dalam perusahaan terkait fungsi pengawasan. Berikut pemaparan mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen (Kusmayadi et al, 2015).

1. Dalam pengambilan keputusan operasional, dewan komisaris independen tidak boleh diikuti sertakan. Hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen sebagai pelaksana fungsi pengawasan tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan operasional. Pengambilan keputusan operasional tetap menjadi tugas dan tanggung jawab anggota direksi perusahaan.
2. Dalam keadaan khusus, dewan komisaris dapat memberhentikan sementara dewan direksi yang melakukan pelanggaran dengan catatan harus ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS).
3. Sesuai peraturan perundang-undangan, dewan komisaris independen dapat menggantikan sementara fungsi direksi bila pada saat tersebut terjadi kekosongan posisi direksi.
4. Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, dewan komisaris independen berhak menerima informasi perusahaan secara akurat, dan tepat waktu.
5. Dewan komisaris independen sendiri wajib memiliki tata tertib dan pedoman kerja sebagai salah satu pengukur penilaian kinerja.
6. Dewan komisaris dalam tugasnya melaksanakan pengawasan, menyerahkan laporan terkait pengawasan atas direksi yang mengelola perusahaan.
7. Dewan komisaris dapat membentuk komite dalam menjalankan tugasnya. Komite audit sekurang-kurangnya harus dimiliki perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola masyarakat.

Dewan komisaris independen menjaga lingkungan perusahaan agar tetap sehat dan terhindar dari bentuk kejahatan di dalam perusahaan. Apabila lingkungan perusahaan terjaga, maka kinerja perusahaan semakin baik dalam mencapai tujuan. Semua orang di dalam perusahaan menjalankan aturan perusahaan sesuai peran dan tugas masing-masing. Produktivitas dapat tercapai sehingga perusahaan bisa memaksimalkan laba. Ningrum (2021) menemukan dewan komisaris independen yang kuat dan memiliki keahlian, akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal performa keuangan perusahaan (Ningrum, 2021).

Dewan komisaris independen diatur dalam ketentuan Peraturan Pencatatan Efek Bursa Efek Jakarta (BEJ) tentang Ketentuan Umum Pencatatan Perusahaan Efek Bersifat Ekuitas sejak tanggal 1 Juli 2000. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan jika di dalam perusahaan porsi dewan komisaris independen sekurang-kurangnya sebesar 30% dari total jumlah anggota komisaris. Adanya ukuran porsi yang ditetapkan, memberikan indikasi pengaruh ukuran dewan komisaris independen pada perusahaan. Dalam hal ini ukuran dewan komisaris independen dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Penelitian menunjukkan semakin besar ukuran dewan komisaris independen, maka pelaksana fungsi pengawasan terhadap direksi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga menambah nilai tambah bagi perusahaan (Pratama et al, 2020). Hanifah (2021) juga menyatakan semakin besar ukuran dewan komisaris independen, maka semakin ketat fungsi pengawasan yang bisa dilakukan oleh dewan komisaris independen terhadap direksi. Hal ini mempengaruhi direksi untuk memaksimalkan laba perusahaan agar menyenangkan pemegang saham (Hanifah, 2021). Menurut Nugraha et al (2021), indikator untuk mengukur dewan komisaris independen adalah:

$$\text{Board of Commissioners} = \sum \text{Members of the Board of Commissioners}$$

#### 2.1.4. Board of Directors

*Board of Directors* atau dewan direksi merupakan sekumpulan atau sekelompok orang yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh para pemegang saham untuk bertanggung jawab atas operasional perusahaan (Pratama et al, 2020). Dewan direksi memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan dewan komisaris untuk mengurus struktur organisasi perusahaan dan memastikan otoritas berjalan dengan baik. Setiap anggota direksi melaksanakan peran tugas dan membuat keputusan sesuai dengan pembagian kewajiban masing-masing (Nuswantara et al, 2020). Setiap perusahaan memerlukan seorang dewan direksi untuk menjalankan dan mengatur perusahaan. Dewan direksi menetapkan strategi perusahaan dan menjalankan manajemen perusahaan. Mereka layaknya tangan kanan dari para pemegang saham. Mereka bertindak atas instruksi yang diberikan para pemegang saham agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan.

Menurut Kusmayadi et al (2015), ada beberapa prinsip yang perlu dipenuhi oleh dewan direksi agar pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif.

1. Komposisi direksi harus sebaik mungkin sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan independen. Berikut komposisi direksi yang baik:
  - a) Jumlah dewan direksi mengikuti kompleksitas perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan efektifitas.
  - b) Pemilihan dewan direksi dilakukan secara terbuka atau transparan pada rapat umum pemegang saham (RUPS).
  - c) Dewan direksi mempunyai hak untuk membela diri saat akan diberhentikan pada RUPS.
  - d) Bertempat di Indonesia sehingga dapat bertugas sehari-hari.
2. Dewan direksi merupakan seseorang yang memiliki integritas dan pengalaman kerja yang cukup untuk menjalankan tugasnya.

3. Dewan direksi bertanggung jawab pada pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (laba) dan menjaga keberlangsungan perusahaan.
4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dewan direksi dipilih maupun diberhentikan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Adapun fungsi direksi terbagi menjadi 5 diantaranya kepengurusan, manajemen resiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

a. Kepengurusan

Dalam menjalankan fungsi kepengurusan, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- Dewan direksi merencanakan program kerja perusahaan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek sesuai visi, misi, dan nilai perusahaan. Program perencanaan ini harus meminta persetujuan dari dewan komisaris atau pada saat RUPS.
- Dewan direksi memanfaatkan secara efektif dan efisien akan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.
- Dewan direksi harus memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan.
- Tugas tertentu yang dimiliki oleh dewan direksi dapat diberikan kepada komite atau karyawan lain dengan catatan tanggung jawab tetap pada dewan direksi.
- Dewan direksi memerlukan pedoman kerja dan tata tertib sebagai salah satu penilaian kerja direksi.

b. Manajemen Resiko

Dalam pengoperasian perusahaan, tidak heran akan terdapat kemungkinan resiko yang muncul. Resiko yang terbentuk tidak diketahui seberapa besar pastinya. Resiko yang timbul bisa kecil maupun besar. Perusahaan tidak dapat memprediksi pasti resiko

tersebut. Namun, perusahaan dapat melakukan perencanaan awal untuk tindak pencegahan terkait kemungkinan resiko yang bisa muncul. Hal ini disebut sebagai manajemen resiko. Dewan direksi memiliki fungsi tugas untuk melakukan manajemen resiko, diantaranya:

- Dewan direksi melakukan perencanaan resiko meliputi seluruh aspek perusahaan dengan menyusun dan menerapkan perencanaan tersebut kepada perusahaan.
- Dewan direksi harus memperhitungkan dampak dan hasil yang tercipta dari sebuah keputusan. Hal ini terkait strategi yang akan diambil, misalnya pada penciptaan produk baru dimana tidak boleh terjadi ketimpangan.
- Adapun perusahaan membutuhkan sebuah unit atau tim untuk melakukan pengendalian resiko.

c. Pengendalian Internal

Dewan direksi sebagai pihak yang menjalankan operasional perusahaan (internal), tentunya butuh sebuah pengendalian agar setiap bagian perusahaan dapat berjalan secara teratur dan selaras.

Pengendalian tersebut diantaranya:

- Dewan direksi membuat sistem pengendalian internal dengan mengacu peraturan perundang-undangan untuk menjaga asset perusahaan serta mempertahankan kinerja perusahaan dengan baik.
- Pembentukan satuan kerja pengawasan internal.
- Satuan kerja pengawasan internal yang dibentuk memiliki tugas untuk membantu evaluasi program kerja perusahaan, memberikan pendapat maupun saran, mengamati sejauh mana perusahaan mengikuti pedoman GCG sesuai peraturan perundang-undangan, memfasilitasi pekerjaan audit perusahaan (internal maupun eksternal).

- Satuan kerja pengawasan internal bertanggung jawab langsung pada direktur utama perusahaan.

d. Komunikasi

Komunikasi menjadi permasalahan yang sering sekali ditemui di dalam kehidupan. Di dalam perusahaan, komunikasi penting sebagai penyalur berita bagi setiap anggota perusahaan. Adanya kekeliruan informasi dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Dewan direksi untuk memiliki komunikasi yang baik. Tanpa komunikasi yang baik dari direksi, maka informasi seterusnya hingga ke bawah akan salah juga. Komunikasi yang baik harus dimulai dari bagian tertinggi dalam operasional perusahaan yaitu dewan direksi, diantaranya:

- Dewan direksi memastikan tidak ada ketimpangan informasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.
- Pemberdayaan fungsi sekretaris perusahaan untuk menjami arus informasi dan menjamin tersedianya informasi yang boleh diberikan.
- Sekretaris perusahaan sebagai pembantu dewan direksi, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Sekretaris perusahaan bertanggung jawab langsung kepada dewan direksi.

e. Tanggung Jawab Sosial

Dalam perjalanan perusahaan, perusahaan harus memperhatikan tanggung jawabnya kepada lingkungan sosial. Ini penting karena dapat mempengaruhi citra perusahaan dimata publik. Perusahaan yang tidak memperhatikan tanggung jawab sosial akan mendapat penilaian yang buruk meskipun tidak ada yang salah dengan produk yang ditawarkan. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan etika yang dimiliki perusahaan bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab kepada lingkungan atas apa produksi yang dibuat. Untuk itu, penting bagi dewan direksi untuk menyusun perencanaan tanggung



jawab sosial setelah perencanaan strategis dibuat. Perencanaan sosial yang telah dikenal dan banyak diterapkan perusahaan ialah *corporate social responsibility (CSR)*.

Menurut Naciti (2019) adanya dewan direksi sebagai struktur utama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, mengharuskan direksi untuk meratifikasi, mengendalikan, dan mengevaluasi manajer. Hal ini dapat membawa perusahaan pada keuntungan kompetitif. Perusahaan dapat meminimalisir tindakan yang berpotensi untuk merugikan perusahaan dengan bukti biaya yang dapat dikurangi dari hal yang tidak perlu (Pratama et al, 2020). Dengan ini, performa perusahaan dapat meningkat yang kemudian memberikan keuntungan laba pada perusahaan. Ukuran daripada dewan direksi memiliki pengaruh pada tugas dan fungsi direksi. Semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya karena pengendalian dan pengawasan terjadi secara lebih maksimal. Di lain sisi semakin kecil ukuran dewan direksi maka perusahaan dalam meningkatkan pendapatan semakin turun pula (Saona et al, 2020). Menurut Pratama (2020), indikator untuk mengukur dewan direksi adalah:

$$Board\ of\ Directors = \sum Total\ Board\ of\ Directors$$

#### **2.1.5. Audit Committee**

*Audit committee* atau komite audit merupakan suatu lembaga di dalam perusahaan yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* serta mematuhi peraturan yang ada baik internal maupun eksternal (Cahyati et al, 2021). Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit merupakan sebuah komite yang dibuat dan diberhentikan langsung oleh dewan komisaris perusahaan dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 orang meliputi dewan komisaris sebagai pimpinan dan sisanya merupakan pihak eksternal perusahaan yang netral. Keberadaan komite audit di dalam perusahaan melakukan pengawasan hubungan kepentingan yang sering terjadi perbedaan. Komite audit lebih lanjut

melakukan pengawasan terhadap bentuk kecurangan di perusahaan yang dilakukan pihak-pihak terkait serta mengawasi laporan keuangan perusahaan (Pratomo & Rana, 2021). Untuk menjalankan tugas dan perannya dalam mengawasi perusahaan, komite audit harus bergerak secara independen dan netral. Sari et al (2020) menyimpulkan komite audit merupakan suatu kelompok khusus yang bergerak independen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan atas laporan keuangan, manajemen resiko, penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan, dan pelaksanaan audit dimana komite audit sendiri ada untuk memperkuat fungsi dewan komisaris (Sari et al, 2020).

Urgensi keberadaan komite audit dilatar belakangi dengan masih kurang optimalnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris perusahaan. Hal ini diperburuk dengan banyaknya perusahaan yang mempunyai pemusatan kontrol manajemen di tangan pihak-pihak tertentu. Adanya pemusatan kontrol tersebut mempengaruhi kinerja pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan. Fungsi pengawasan menjadi tidak efektif dan efisien dimana baik data maupun informasi tidak didapatkan dan diberitakan secara aktual. Alhasil, kinerja perusahaan menjadi terpengaruh kredibilitasnya. Apa yang seharusnya dapat diperbaiki jika memang bermasalah, menjadi seolah baik-baik saja. Maka dari itu komite audit perlu dibentuk untuk memaksimalkan fungsi dan peran pengawasan di dalam perusahaan.

Kusmayadi et al (2015), komite audit memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam membantu dewan komisaris perusahaan (Kusmayadi et al, 2015). Adapun tugas, wewenang, serta tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

1. Komite audit dengan berlandaskan prinsip tanggung jawab (GCG), mendorong terciptanya pengendalian internal di dalam perusahaan yang memadai.

2. Komite audit dengan berlandaskan prinsip transparansi atau keterbukaan (GCG), meningkatkan kualitas dari informasi dan data laporan keuangan.
3. Komite audit dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas (GCG), melakukan pengkajian audit eksternal yang meliputi penggunaan biaya, kemandirian, dan objektivitas yang dilakukan audit eksternal.
4. Di akhir tahun (tahun buku), komite audit mempersiapkan dan menyerahkan surat terkait uraian kerja dan tanggung jawab sebagai bentuk prinsip tanggung jawab.

Pemilihan komite audit dalam perusahaan memiliki beberapa syarat kualifikasi. Adapun syarat-syarat untuk menjadi komite audit, diantaranya:

- a. Bertanggung jawab langsung kepada dewan direksi.
- b. Wajib memiliki sekurang-kurangnya 1 komisaris independen dan 2 orang minimal yang merupakan pihak eksternal perusahaan.
- c. Komite audit merupakan seseorang yang memiliki integritas dan pengalaman kerja yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
- d. Salah satu orang dari bagian komite audit, memiliki pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan.
- e. Mampu dalam membaca dan memahami laporan keuangan.
- f. Bukan dan tidak termasuk anggota Kantor Akuntan Publik dalam satu tahun terakhir sebelum dipilih dewan komisaris.
- g. Bukan karyawan penting di dalam perusahaan emiten atau perusahaan *go public* dalam satu tahun terakhir sebelum dipilih dewan komisaris.
- h. Tidak boleh memiliki saham secara langsung maupun tidak langsung dari perusahaan emiten. Dalam keadaan khusus hukum yang membuat pihak bersangkutan mendapatkan kepemilikan saham, maka dalam waktu 6 bulan kepemilikan tersebut harus dipindahkan ke orang lain.

- i. Tidak mempunyai hubungan tertentu dengan perusahaan, anggota direksi (direktur), komisaris, dan para pemegang saham.
- j. Tidak mempunyai usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan emiten.
- k. Tidak sedang menjabat juga sebagai anggota komite audit di perusahaan lain pada waktu yang sama.

Rinta (2021), komite audit memiliki tanggung jawab dalam hal akuntabilitas dan kualitas dari laporan keuangan perusahaan. Kompetensi saja tidak cukup bagi kualifikasi komite audit yang baik. Mereka perlu aktif dalam melakukan tugasnya dan juga memiliki anggota yang cukup. Anggota komite audit akan menambah fungsi pengawasan yang dilakukan. Ukuran komite audit sekurang-kurangnya berjumlah 3. Penentuan ukuran komite audit telah ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Berkaca dari *agency theory* (teori keagenan), manajemen akan berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat menyenangkan hati para pemegang saham. Untuk itu, komite audit diperlukan agar tercipta validasi laporan keuangan perusahaan sebagai pemisah hubungan manajemen dengan pemangku kepentingan. Maka dari itu semakin besar ukuran komite audit perusahaan, pengawasan yang dilakukan dapat lebih maksimal sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan (Rinta, 2021). Menurut Sari et al (2020), indikator untuk mengukur komite audit adalah:

$$Audit\ Committee = \sum\ Komite\ Audit$$

#### 2.1.6. Institutional Ownership

Setiap perusahaan yang didirikan pasti memiliki pendirinya masing-masing. Pendiri sebagai orang yang mendirikan perusahaan menjadi pemegang kendali atas perusahaan. Adapun kasus dimana perusahaan memiliki beberapa pendiri, kepemilikan atas perusahaan terbagi atas seberapa

besar porsi modal yang ditaruh dari para pendiri. Pendiri yang memegang kepemilikan perusahaan terbesar adalah pendiri yang menaruh modal lebih besar dibanding pendiri yang lain. Dalam pengoperasian suatu perusahaan, tidak jarang ditemukan jika perusahaan membutuhkan modal tambahan dalam rangka ingin meningkatkan produksi atau bisa datang dari keinginan untuk melakukan ekspansi. Semua upaya itu jelas membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk dikeluarkan. Para pendiri kemudian akan mencari cara bagaimana perusahaan bisa mendapat modal tambahan untuk keperluan peningkatan performa perusahaan. Untuk itu ada istilah *go public* yang muncul.

Perusahaan dalam hal ini mendaftarkan dirinya kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator yang mengelola bursa efek perusahaan-perusahaan. Dengan *go public*, perusahaan menerbitkan lembar saham kepemilikan yang bisa dimiliki oleh pihak luar. Hal ini bertujuan agar perusahaan bisa menghimpun dana segar dari para investor. Dana tersebut bisa digunakan perusahaan untuk kemudian merealisasikan pengembangan perusahaan. Adapun beberapa institusi yang kemudian membeli lembar saham perusahaan dalam jumlah yang besar. Pembelian saham dalam jumlah besar tersebut memberikan hak kepada institusi untuk turut andil dalam pengambilan keputusan. Mereka merupakan pihak di luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan baik dari segi operasional hingga manajemen, namun kemudian menjadi salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan. Mereka sering disebut dengan istilah kepemilikan institusi.

*Institutional Ownership* atau kepemilikan institusional merupakan kepemilikan atas saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan modal ventura. Nurhayati & Wijayanti (2022) kepemilikan institusional merupakan suatu keadaan dimana suatu institusi baik itu institusi pemerintah, swasta, asing, maupun masyarakat mempunyai kepemilikan saham atas suatu perusahaan. Adanya kepemilikan institusional diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi

perusahaan. Kepemilikan institusi dalam hal ini institusi yang terkait, memiliki peran pengawasan dalam mengawasi jalannya perusahaan dari luar. Kepemilikan atas saham dalam jumlah yang besar, memberikan para institusi kewenangan atau otoritas serupa dengan pemegang saham untuk memberhentikan direksi dan komisaris yang melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan manajemen akan sebisa mungkin untuk melakukan peforma terbaik agar dapat memberikan perusahaan peningkatan dalam hal kinerja maupun keuntungan (Maulana, 2020).

Kecenderungan manajemen untuk memberikan peforma terbaiknya, menunjukkan adanya pengaruh kepemilikan institusional di dalam perusahaan. Aminah & Wuryani (2021) menyatakan semakin tinggi kepemilikan institusional di perusahaan dapat mengurangi perilaku buruk seperti kinerja kurang baik, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional secara tidak langsung memberikan kontrol pengawasan eksternal yang semakin kuat di dalam perusahaan. Perusahaan dapat meminimalisir masalah keagenan yang sering terjadi dan mengurangi biaya yang tidak perlu akibat permasalahan tersebut (Aminah & Wuryani, 2021). Penelitian yang dilakukan Wardhani & Samrotun (2020) juga setuju bahwa adanya kepemilikan institusional mendorong peningkatan pengawasan dan memberikan pengaruh bagi kinerja manajemen. Perhitungan kepemilikan institusional menggunakan skala rasio jumlah saham yang dimiliki institusi terhadap jumlah saham yang beredar. Menurut Pratomo & Rana (2021), indikator untuk mengukur kepemilikan institusi adalah:

$$\text{Institutional Ownership} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki institusional}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### **2.1.7. Firm Size**

*Firm Size* atau ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan, dilihat dari total asset yang dimiliki meliputi jumlah modal, pendapatan, penjualan, nilai pasar, dan lainnya.

Nasution & Sari (2020) menyatakan ukuran perusahaan sebagai nilai yang menggambarkan seberapa besar jumlah asset yang dimiliki perusahaan. Adapun menurut Jufrizen & Fatin (2020) ukuran perusahaan adalah gambaran mengenai besar kecilnya sebuah perusahaan yang dilihat dari nilai ekuitas, nilai perusahaan atau jumlah total asset yang perusahaan miliki. Setiap perusahaan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang memiliki skala kecil, menengah, hingga besar. Pengukuran akan perusahaan tersebut dapat diukur melalui ukuran perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran perusahaan antara lain dilihat dari seberapa mudah tingkat perusahaan dalam memperoleh modal, kekuatan tawar menawar, dan pengaruh skala biaya dan *return* (Jufrizen & Fatin, 2020).

Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 yaitu skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Hal ini mengacu pada peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Skala Kecil atau Emiten dengan Skala Menengah yaitu Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017. Dalam peraturan tersebut, pembagian bentuk ukuran perusahaan dinyatakan sebagai berikut:

1. Skala Kecil

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017, sebuah emiten (perusahaan) termasuk ke dalam skala kecil jika memiliki total asset perusahaan tidak lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

2. Skala Menengah

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017, sebuah emiten (perusahaan) termasuk ke dalam skala menengah jika memiliki total asset perusahaan dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) hingga Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

3. Skala Besar

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 53/POJK.04/2017, sebuah emiten (perusahaan) termasuk ke dalam skala besar jika memiliki total asset perusahaan lebih dari Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Setiap perusahaan menginginkan agar perusahaannya memiliki nilai yang bagus dimata para investor. Investor dalam hal ini cenderung lebih menyukai dan tertarik untuk melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai yang baik meliputi kinerja, produksi, pendapatan, penjualan, sumber daya manusia, dan lainnya. Ukuran perusahaan dipercaya dapat mempengaruhi gambaran tentang suatu perusahaan. Menurut Nasution & Sari (2020) perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil dibandingkan perusahaan dengan ukuran perusahaan yang kecil. Kondisi perusahaan yang stabil membuat investor melirik. Investor akan kemudian lebih tertarik pada perusahaan dengan ukuran perusahaan skala besar karena memiliki kondisi yang lebih stabil. Alhasil, perusahaan akan lebih mudah mendapat pendanaan modal dari para investor. Dana segar dari investor dapat digunakan perusahaan untuk melakukan pengembangan perusahaan sehingga perusahaan menjadi semakin besar dan berkembang.

Ukuran perusahaan juga dapat memberikan pengaruh pada kinerja perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, perusahaan otomatis memiliki lebih banyak sumber daya, salah satunya sumber daya manusia. Dengan memiliki sumber daya manusia yang banyak, perusahaan memiliki banyak potensi dan keterampilan untuk digunakan bagi kepentingan perusahaan dalam menunjang kinerja perusahaan (Windaryani & Jati, 2020). Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang positif dan memiliki prospek yang menjanjikan dimasa mendatang. Indrayani et al (2021) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan dapat mencerminkan tingkat pendapatan yang baik dan memperlihatkan upaya dari perusahaan untuk berkomitmen



memperbaiki kinerja perusahaan. Menurut Dewi & Ekadjaja (2020), indikator untuk mengukur ukuran perusahaan adalah:

$$Firm\ Size = Ln(Total\ Asset)$$

#### **2.1.8. Profitability**

Setiap perusahaan memiliki visi, misi, dan strategi yang diterapkan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan laba yang dihasilkan. Laba suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas perusahaan dalam kemampuannya menghasilkan laba. Menurut Rahmawati & Nani (2021) profitabilitas sebagai cerminan pengelolaan sebuah perusahaan dalam kemampuannya memaksimalkan penggunaan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas menjadi sebuah alat ukur untuk mengukur bagaimana kinerja manajemen perusahaan. Semakin baik kinerja yang dimiliki perusahaan, perusahaan mampu untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Sebaliknya semakin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan, maka laba yang dihasilkan perusahaan juga akan lebih sedikit (Rahmawati & Nani, 2021).

Wulandari & Efendi (2022), profitabilitas merupakan hasil akhir yang menyangkut serangkaian peraturan manajemen terkait penyelenggaraan kegiatan operasional dan bagaimana penggunaan dana perusahaan. Dana perusahaan memiliki fungsi sebagai modal perusahaan dalam menjalankan kegiatan maupun sebagai modal untuk melakukan pengembangan. Pengembangan dilakukan dengan harapan perusahaan dapat semakin berkembang dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Selain itu, pengembangan juga dilakukan perusahaan sebagai bentuk keberlangsungan perusahaan. Tidak dapat dipungkiri jika sebuah perusahaan ingin bertahan usahanya, maka perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang berubah. Perusahaan perlu beradaptasi supaya perusahaan dapat memberikan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Profitabilitas memiliki hubungan terkait keberlangsungan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi

menunjukkan perusahaan mempunyai prospek yang bagus di masa depan (Wulandari & Efendi, 2022).

Penelitian Asyati & Farida (2020) menunjukkan tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat sebuah perusahaan untuk dapat menghasilkan laba perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan, maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba juga besar. Rasio profitabilitas juga memperlihatkan tingkat daripada manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas perusahaan, maka penerapan manajemen perusahaan telah berjalan dengan efektif. Rasio profitabilitas juga menjadi alat ukur yang digunakan oleh investor ketika ingin melakukan investasi di dalam perusahaan. Investor akan lebih tertarik pada perusahaan yang mempunyai rasio profitabilitas yang tinggi karena tujuan dilakukan investasi agar investor dapat menerima keuntungan dari investasinya. Maka dari itu investor pasti akan memilih perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi sebagai salah satu pertimbangannya dalam melakukan investasi. Dengan begitu, perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang tinggi akan mempunyai potensi lebih di mata para investor.

Pengukuran rasio profitabilitas memiliki beberapa macam cara. Salah satu bentuk pengukuran rasio profitabilitas perusahaan adalah menggunakan *Return on Equity* (ROE). *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang menggambarkan kondisi atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba bersih yang menguntungkan bagi para pemegang saham. ROE yang tinggi mencerminkan perusahaan telah berhasil memaksimalkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dan juga perusahaan berhasil meningkatkan nilai dan kinerjanya (Almira & Wiagustini, 2020). Amelia & Sunarsi (2020), ROE sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan perusahaan.

Menurut Agustinata (2022), indikator untuk mengukur *return on equity* (ROE) adalah:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Equity}}$$

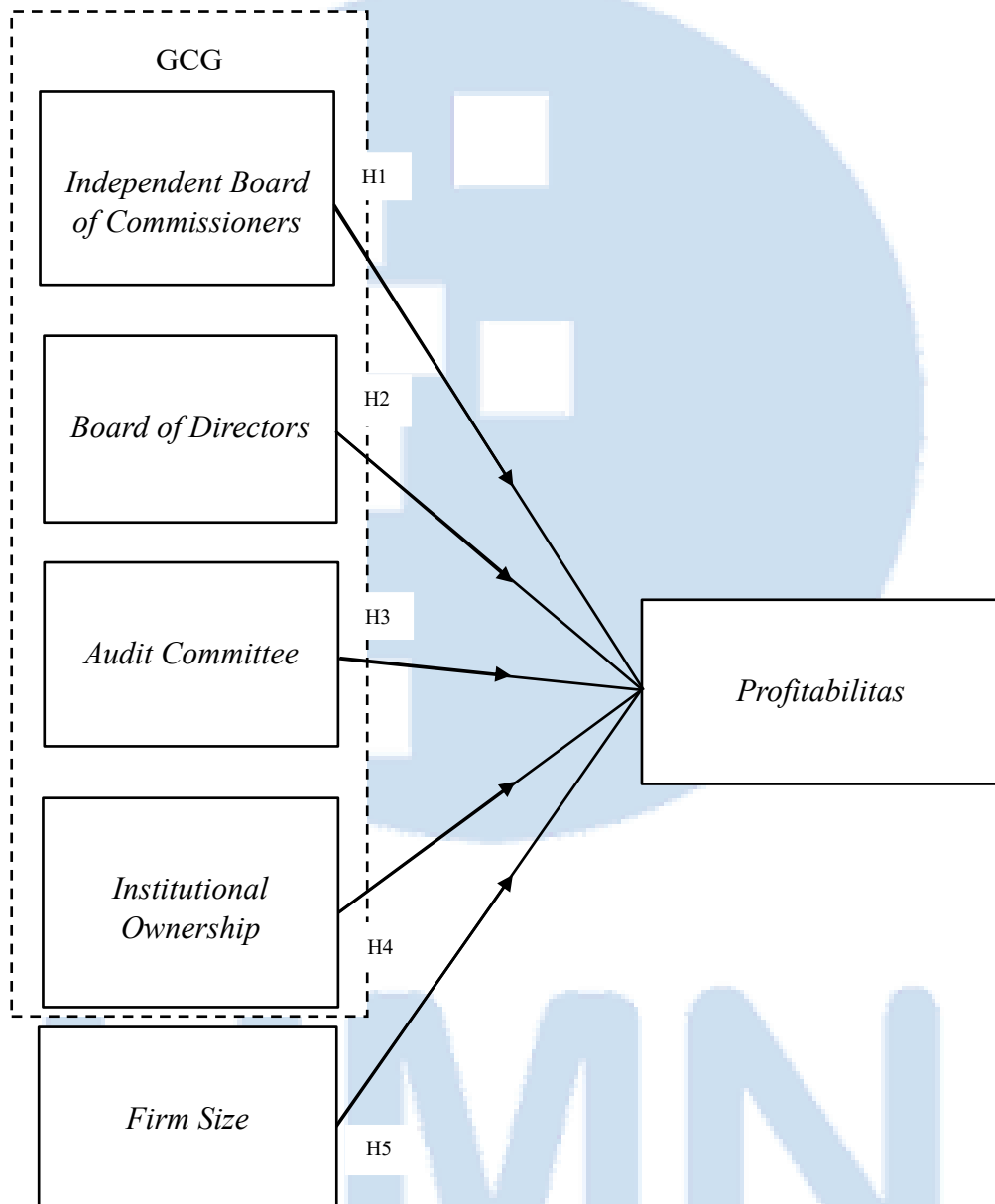
Keterangan:

*Net Profit After Tax*: Laba bersih setelah pajak

*Total Equity*: Total ekuitas



## 2.2. Model Penelitian



## 2.3. Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1. Pengaruh Independent Board of Commissioners terhadap Profitabilitas

*Independent board of commissioners* atau dewan komisaris independen merupakan komisaris yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen di perusahaan. Komisaris independen mempunyai fungsi untuk memonitor apakah strategi pengelolaan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan telah berjalan dengan baik dan benar. Komisaris independen sekaligus melakukan penilaian terhadap manajemen perusahaan. Penilaian tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengembangan pengendalian internal yang telah dilakukan manajemen (Rusli et al, 2020). Seorang pemimpin wajib memberikan contoh yang baik bagi perusahaan agar dapat dicontoh oleh anggota lainnya. Komisaris independen juga melakukan pemantauan perilaku dan sikap manajemen perusahaan (Safitri & Purwaningsih, 2023).

Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam *Good Corporate Governance* sebagai pengarah dan pengawas dalam jalannya perusahaan (Rusli et al, 2020). Keberadaan komisaris independen di dalam perusahaan, dapat mengurangi masalah agensi yang terjadi. Pengawasan komisaris independen terhadap manajemen perusahaan dapat mengurangi adanya kemungkinan penyimpangan yang dilakukan manajemen perusahaan (Ningrum, 2021). Manajemen perusahaan termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan benar sehingga kesalahan tidak terjadi. Kesalahan yang diminimalisir kemudian dapat memberikan peningkatan pada kinerja perusahaan. Nuswantara et al (2020), adanya dewan komisaris independen di dalam perusahaan dapat mengurangi masalah agensi seperti informasi asimetris dan penipuan. Hal ini membuat perusahaan mempunyai manajemen yang baik dan ketat sehingga perusahaan dapat lebih maksimal dalam menghasilkan laba.

Nugraha et al (2021) berpendapat jika komisaris independen dapat bertindak secara netral dan objektif karena komisaris independen tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Komisaris independen dapat mengawasi perlakuan manajemen di perusahaan. Akan tetapi Nugraha et al (2021) juga menambahkan bahwa ukuran komisaris independen mempunyai pengaruh dalam tugas yang dijalankan. Ukuran kecil menyebabkan pengawasan yang dilakukan akan kurang maksimal dibanding dengan ukuran komisaris independen yang lebih besar. Jika manajemen perusahaan memiliki kekuatan yang lebih besar, maka pengawasan yang dilakukan komisaris independen dapat berpotensi menjadi kurang optimal (Nugraha et al, 2021). Dewan komisaris memiliki peranan penting untuk melihat kinerja manajemen dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ketika dewan komisaris berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, citra perusahaan akan menarik dimata investor. Investor tertarik dengan perusahaan yang memiliki latar belakang yang bagus serta kondisi keuangan yang stabil. Adanya peran dewan komisaris independen membuat manajemen perusahaan untuk menjalankan perusahaan dengan baik (Safitri & Purwaningsih, 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni et al (2022) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safitri & Purwaningsih (2023) bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Adanya dewan komisaris independen memberikan penambahan biaya gaji pada perusahaan. Dewan komisaris juga hanya melakukan pengawasan saja dan tidak melakukan pengambilan keputusan strategi perusahaan. Averio (2022) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi akibat peran pengawasan yang tidak dijalankan secara efektif oleh dewan komisaris independen sehingga tidak memberikan kontribusi pada peningkatan laba. Oleh karena itu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut.

**H1: *Independent board of commissioners* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas**

### **2.3.2. Pengaruh *Board of Directors* terhadap Profitabilitas**

*Board of directors* atau dewan direksi merupakan sekumpulan orang yang dipilih untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab operasional perusahaan baik yang berhubungan dengan bisnis maupun pada bentuk tanggung jawab sosial sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan direksi memiliki fungsi dalam melakukan pengendalian serta mengambil keputusan strategi perusahaan (Averio, 2022). Pelaksanaan dan pengelolaan perusahaan baik atau tidaknya tercermin dari kebijakan yang dibuat oleh dewan direksi. Jika kebijakan dan strategi yang dibuat dewan direksi dapat dipahami dan dijalankan seluruh anggota perusahaan, maka dapat memberikan hasil baik bagi kinerja perusahaan (Riyandika & Saad, 2020).

Dewan direksi merupakan orang-orang yang dipilih berdasarkan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki. Masalah yang dimiliki setiap perusahaan tentu berbeda-beda. Masalah yang timbul bisa jadi sangat kompleks untuk diselesaikan. Kebijakan yang tepat diperlukan perusahaan agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu dibutuhkan seorang dewan direksi yang kompeten agar dapat membuat keputusan yang tepat. Banyaknya ukuran dewan direksi di perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian masalah (Febiyanti & Hersugondo, 2022). Ukuran dewan direksi memberikan pengaruh di dalam perusahaan. Semakin besar ukuran dewan direksi di suatu perusahaan, koordinasi dan proses operasional di perusahaan dapat berjalan dengan baik (Triafna et al, 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Intia & Azizah (2021) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Semakin banyak dewan direksi di dalam suatu perusahaan, akan menyebabkan karakteristik setiap dewan direksi dalam

mengelola perusahaan. Hal ini akan mempengaruhi dalam efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan menjadi kurang optimal sehingga akan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Intia & Azizah didukung oleh penelitian yang dilakukan Prayanthi & Laurens (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on equity* (ROE). Bertambahnya dewan direksi di dalam perusahaan, menyebabkan penurunan pada kinerja keuangan yang ada di perusahaan. Lebih lanjut penelitian oleh Suciwati et al (2022) menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROE) dimana semakin bertambahnya dewan direksi, maka profitabilitas perusahaan akan menurun. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penambahan dewan direksi di dalam perusahaan menyebabkan biaya gaji perusahaan bertambah. Biaya gaji yang bertambah ini akan mengurangi laba yang bisa diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut.

**H2: *Board of directors* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas**

### **2.3.3. Pengaruh *Audit Committee* terhadap Profitabilitas**

*Audit committee* atau biasa disebut dengan komite audit merupakan sekelompok orang yang dibentuk, berjumlah minimal 3 orang, memiliki tugas dalam membantu fungsi dewan komisaris, serta tidak berkaitan langsung dengan perusahaan (eksternal). Komite audit bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit memiliki ciri khas atau karakteristik yaitu independensi (Rizaldi et al, 2022). Komite audit termasuk ke dalam bagian dari aspek tata kelola perusahaan. Mereka mempunyai keterlibatan dengan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tujuan dan kinerja perusahaan (Hartono & Laksito, 2022).

Komite audit dituntut untuk menjadi pihak yang netral (Tanujaya & Reny, 2022). Komite audit diharapkan mampu untuk memberikan pengawasan yang ketat serta memberikan informasi akurat mengenai kinerja



perusahaan (Rizaldi et al, 2022). Tugas pelaksanaan audit biasanya berkaitan dengan arah keuangan di perusahaan, seperti laporan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal di dalamnya (Hartono & Laksito, 2022). Para pemangku kepentingan menginginkan adanya transparansi dalam perusahaan termasuk dalam hal laporan keuangan. Hal itu agar menghindari terjadinya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dengan para *shareholders* perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan meningkatkan kualitas audit perusahaan atas laporan keuangan yang akurat dan relevan (Cahyati et al, 2021).

Komite audit memiliki peran untuk memastikan kebijakan perusahaan telah dijalankan dengan benar pada kegiatan operasional sehari-hari (Sari et al, 2020). Komite audit melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Pengawasan akan lebih optimal bila dilakukan oleh banyak pihak. Tanujaya & Reny (2022) melakukan penelitian terkait komite audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar skala komite audit yang dimiliki maka kualitas dari pengawasan yang dilakukan audit dapat lebih efektif dan efisien (Tanujaya & Reny, 2022). Penelitian oleh Sari et al (2020) juga setuju dengan pernyataan tersebut bahwa adanya komite audit akan mempengaruhi kredibilitas keuangan perusahaan. Semakin besar jumlah komite audit, semakin ketat pengawasan yang dilakukan, maka kinerja manajemen akan meningkat (Pratomo & Rana, 2021).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2022) menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Hal tersebut didukung oleh penelitian Katutari & Yuyetta (2019) bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas perusahaan. Komite audit hanya melakukan pengawasan serta membantu proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, namun peningkatan laba bukan dari banyaknya pengawasan yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani et al (2022) menunjukkan juga jika ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya

profitabilitas perusahaan. Adapun penelitian oleh Suciwati et al (2022) menyatakan bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh banyaknya komite audit di perusahaan, namun dari kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut.

**H3: *Audit committee* memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas**

#### **2.3.4. Pengaruh *Institutional Ownership* terhadap Profitabilitas**

*Institutional ownership* atau disebut juga dengan kepemilikan institusional merupakan pihak institusi yang memiliki kepemilikan atas saham suatu perusahaan dalam jumlah tertentu (Patricia & Listiyowati, 2022). Kepemilikan atas saham perusahaan dapat dikatakan besar jika memiliki porsi saham sekitar 5% atau lebih dari total saham yang beredar (Patricia & Listiyowati, 2022). Kepemilikan institusional ada untuk mengurangi masalah keagenan yang sering terjadi di perusahaan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. Kehadiran kepemilikan institusional menjadi pemisah antara pemilik dengan manajemen perusahaan (Pangesti et al, 2022). Kepemilikan institusional sendiri bisa datang dari domestik maupun pihak asing (Patricia & Listiyowati, 2022). Keberadaan kepemilikan institusional diyakini dapat mengawasi perilaku manajemen perusahaan yang sering oportunistik (Pangesti et al, 2022). Manajer akan dituntut untuk bertindak secara hati-hati dalam hal pekerjaan maupun pengambilan keputusan karena hal tersebut akan memberikan pengaruh bagi saham (Puspita et al, 2023). Institusi akan melakukan pengawasan terhadap perilaku manajemen perusahaan. Hal tersebut akan membuat manajemen melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menghasilkan keuntungan (Maulana, 2020). Kepemilikan institusional memberikan pengaruh bagi keuangan di perusahaan (Puspita et al, 2023).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Kepemilikan institusional mengurangi konflik keagenan di dalam perusahaan. Kepemilikan institusional memonitoring

kinerja dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan Puspita et al (2023) juga memberikan hasil serupa dimana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap laba bersih perusahaan. Tingginya kepemilikan institusional di dalam perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dalam memaksimalkan laba. Penelitian selanjutnya oleh Dharma & Andriyanty (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif pada profitabilitas perusahaan dikarenakan semakin tinggi saham yang dimiliki institusi maka keuangan perusahaan akan meningkat. Oleh karena itu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut.

**H4: *Institutional ownership* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas**

#### **2.3.5. Pengaruh *Firm Size* terhadap Profitabilitas**

*Firm size* atau ukuran perusahaan merupakan gambaran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan (Mardaningsih et al, 2021). Ukuran perusahaan diartikan sebagai skala yang mengukur besarnya suatu perusahaan (Aprilia & Kusumawati, 2020). Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dari asset yang dimiliki. Perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan skala besar, memiliki asset yang besar pula. Perusahaan yang memiliki asset yang banyak biasanya memiliki performa yang baik. Ukuran perusahaan memberikan penilaian yang berbeda di mata para investor (Dewi & Ekadjaja, 2020). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan dalam memperoleh pendanaan dari para investor akan semakin mudah (Novitasari & Krisnando, 2021). Dana yang didapat tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan pengembangan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Apabila tujuan perusahaan tercapai, maka perusahaan dapat menghasilkan laba yang besar. Hal ini sejalan dengan penelitian Julietha & Natsir (2021). Perusahaan dengan ukuran yang besar, memiliki sumber daya yang besar yang dapat digunakan untuk ekspansi bisnis (Julietha

& Natsir, 2021). Perusahaan dapat semakin memperluas pasarnya dan otomatis akan terjadi peningkatan pada laba perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nainggolan et al (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas. Semakin besar sebuah perusahaan maka akan memberikan pengaruh pada manajemen agar melakukan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana perusahaan dengan lebih optimal. Apabila penggunaan dana perusahaan digunakan secara optimal dan tepat, maka laba perusahaan dapat meningkat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alawiah et al (2022) menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Semakin besar ukuran perusahaan akan memberikan sinyal positif bagi para investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Julietha & Natsir (2021) juga memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan yang semakin besar memberikan perusahaan keuntungan di pasar serta memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya sehingga laba akan lebih maksimal. Oleh karena itu, penulis menarik hipotesis sebagai berikut.

**H5: *Firm size* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas**

## 2.4. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Manfaat bagi Penelitian
1.	Anggraeni et al (2022)	Analisis Pengaruh Mekanisme Internal <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas Perusahaan.	Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.	Pendukung H1
2.	Safitri & Purwaningsih (2023)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Kualitas Audit terhadap Profitabilitas.	Dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.	Pendukung H1
3.	Averio (2022)	<i>Board of Directors, Board of Commissioners, Independent Commissioners, Audit Committee, and Profitability: An Empirical Study.</i>	Dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.	Pendukung H1
4.	Intia & Azizah (2021)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.	Dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas.	Pendukung H2
5.	Prayanthi & Laurens (2020)	<i>Effect of Board of Directors, Independent Commissioners, and Committee Audit on Financial Performance in the Food and Beverage Sector.</i>	Dewan direksi memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan perusahaan.	Pendukung H2
6.	Suciwati et al	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite	Dewan direksi memiliki pengaruh negatif signifikan	Pendukung H2

	(2022)	Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan di BEI.	terhadap profitabilitas (ROE).	
7.	Kusuma (2022)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.	Komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.	Pendukung H3
8.	Katutari & Yuyetta (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusi, Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Profitabilitas.	Ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif pada profitabilitas perusahaan.	Pendukung H3
9.	Ramadhani et al (2022)	Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Komite Audit terhadap Profitabilitas.	Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap naik atau turunnya profitabilitas perusahaan.	Pendukung H3
10.	Suciwati et al (2022)	Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Profitabilitas Perusahaan di BEI.	Profitabilitas tidak dipengaruhi oleh banyaknya komite audit di perusahaan, namun dari kualitas sumber daya manusianya.	Pendukung H3
11.	Hasibuan (2022)	Pengaruh Efektivitas Komite Audit dan Kepemilikan Institusional ( <i>Institutional Ownership</i> ) terhadap Profitabilitas pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa	Kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Pendukung H4

		Efek Indonesia Periode 2017-2019.		
12.	Puspita et al (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kas Setara Kas terhadap Laba Bersih pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan.	Pendukung H4
13.	Dharma & Andriyanty (2022)	Pengaruh Tindakan Investasi Infrastruktur dan Pelayanan terhadap Masyarakat serta Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan.	Kepemilikan institusional memberikan pengaruh positif pada profitabilitas perusahaan dikarenakan semakin tinggi saham yang dimiliki institusi maka keuangan perusahaan akan meningkat.	Pendukung H4
14.	Nainggolan et al (2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i> terhadap Profitabilitas pada Sektor <i>Food and Beverage</i> dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.	Ukuran perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas.	Pendukung H5
15.	Alawiah et al (2022)	Pengaruh <i>Leverage</i> dan <i>Firm Size</i> terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Industri <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2021.	Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas perusahaan.	Pendukung H5

16.	Julietha & Natsir (2021)	Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, <i>Firm Size</i> , dan <i>Firm Growth</i> terhadap Profitabilitas.	Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap profitabilitas.	Pendukung H5
17.	Ardini (2022)	Anggaran dalam Perspektif <i>Agency Theory</i> .	Perbedaan tersebut tidak jarang menjadi awal terjadinya <i>conflict of interest</i> atau konflik kepentingan antara <i>top level</i> manajemen dengan para <i>shareholder</i> . Konflik ini dikenal juga dengan istilah <i>agency problem</i> .	Pendukung Teori <i>Agency Theory</i>
18.	Schillemans & Bjurstrom (2020)	<i>Trust and Verification: Balancing Agency and Stewardship Theory in The Governance of Agencies.</i>	Ada 2 masalah yang menjadi perhatian di dalam teori keagenan; diantaranya hubungan kepentingan yang saling bertentangan (antara para pemegang saham dan eksekutif), dan bagaimana kontrol yang dilakukan para pemegang saham atas apa yang dilakukan oleh eksekutif perusahaan.	Pendukung Teori <i>Agency Theory</i>
19.	Panda & Leepsa (2017)	<i>Agency Theory: Review of Theory and Evidence on Problems and Perspectives.</i>	Masalah agensi dapat terjadi di berbagai bidang. Bidang tersebut; diantaranya akuntansi, keuangan, ekonomi, sosiologi, politik & science, pemasaran,	Pendukung Teori <i>Agency Theory</i>



			<p><i>organisational behaviour</i>, dan masih banyak lagi sehingga membuat masalah agensi ini sangat luas areanya dalam berbagai organisasi.</p>	
20.	Nuswantara et al (2020)	<p><i>Corporate Governance Mechanism and Profitability (Indonesian Banking Company Case).</i></p>	<p>Di lain sisi eksekutif juga bisa menjadi pihak yang salah dengan melakukan suatu yang menguntungkan dirinya, dan tidak mengikuti apa yang diminta oleh para pemegang saham.</p> <p>Setiap anggota direksi melaksanakan peran tugas dan membuat keputusan sesuai dengan pembagian kewajiban masing-masing.</p>	<p>Pendukung Teori <i>Agency Theory, Board of Directors</i></p>
21.	Raimo et al (2020)	<p><i>Do Audit Committee Attributes Influence Integrated Reporting Quality? An Agency Theory Viewpoint.</i></p>	<p><i>Agency theory</i> menjadi salah satu teori yang paling banyak dipakai dalam hal hubungan tata kelola perusahaan.</p>	<p>Pendukung Teori <i>Agency Theory</i></p>
22.	Lumbanraja (2021)	<p>Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> (Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit) terhadap Profitabilitas.</p>	<p>Munculnya <i>Good Corporate Governance</i> diakibatkan oleh tugas pemilik perusahaan dan pengendali perusahaan yang berbeda.</p>	<p>Pendukung Teori <i>Good Corporate Governance</i></p>

23.	Irmawati & Riduwan (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Profitabilitas.	<i>Good Corporate Governance</i> sendiri memiliki tujuan untuk meminimalisir kemungkinan resiko terjadinya masalah keagenan dengan mengamankan aset perusahaan serta nilai investasi jangka panjang.	Pendukung Teori <i>Good Corporate Governance</i>
24.	Rachmawati (2022)	Pengaruh <i>Audit Internal</i> terhadap Peningkatan <i>Good Corporate Governance</i> pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung.	Krisis tersebut tidak hanya mempengaruhi lingkup ekonomi, namun juga lingkup kepercayaan para investor. Selain itu muncul juga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di sejumlah perusahaan. Peristiwa tersebut menjadi cermin bahwa tata kelola perusahaan belum dilaksanakan secara menyeluruh.	Pendukung Teori <i>Good Corporate Governance</i>
25.	Fitrianingsih & Asfaro (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia.	Di Indonesia sendiri konsep <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) mulai dikenal setelah Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)	Pendukung Teori <i>Good Corporate Governance</i>

			dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1999.	
26.	Fitriyani (2021)	Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit terhadap Profitabilitas Perbankan di BEI Tahun 2017-2019.	Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengartikan GCG sebagai sekumpulan aturan sistematis dalam tatanan perusahaan yang mengandung 5 prinsip dasar yaitu <i>transparency</i> , <i>accountability</i> , <i>responsibility</i> , <i>independency</i> , dan <i>fairness</i> .	Pendukung Teori <i>Good Corporate Governance</i>
27.	Nugraha et al (2021)	<i>The Influence of Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Board of Commissioners on Agency Cost.</i>	Selain itu, adanya dewan komisaris independen di suatu perusahaan juga dapat memberikan fungsi pengendalian dan pengawasan manajemen perusahaan.	Pendukung Teori <i>Independent Board of Commissioners</i>
28.	Pratama et al (2022)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2014-2020).	Dewan komisaris independen melakukan pengawasan kinerja manajer perusahaan apakah mereka telah menjalankan tugasnya dengan benar. <i>Board of directors</i> atau dewan direksi merupakan sekumpulan atau	Pendukung Teori <i>Independent Board of Commissioners, Board of Directors</i>

			sekelompok orang yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh para pemegang saham untuk bertanggung jawab atas operasional perusahaan.	
29.	Ningrum (2021)	<i>The Role of Institutional Ownership, Independent Board of Commissioners, and Managerial Ownership on Earnings Management in Manufacturing Companies.</i>	Dewan komisaris independen yang kuat dan memiliki keahlian, akan meningkatkan kinerja perusahaan dalam hal performa keuangan perusahaan.	Pendukung Teori <i>Independent Board of Commissioners</i>
30.	Pratama et al (2020)	<i>The Effect Enterprise Risk Management Disclosure, Intellectual Capital Disclosure, Independent Board of Commissioners, Board of Director, and Audit Committee towards Firm Value.</i>	Penelitian menunjukkan semakin besar ukuran dewan komisaris independen, maka pelaksana fungsi pengawasan terhadap direksi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga menambah nilai tambah bagi perusahaan.	Pendukung Teori <i>Independent Board of Commissioners</i>
31.	Naciti (2019)	<i>Corporate Governance and Board of Directors: The Effect of A Board Composition on Firm Sustainability Performance.</i>	Adanya dewan direksi sebagai struktur utama dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, mengharuskan direksi untuk meratifikasi, mengendalikan, dan mengevaluasi manajer.	Pendukung Teori <i>Board of Directors</i>

32.	Saona et al (2020)	<i>How Do The Ownership Structure and Board of Directors Features Impact Earnings Management? The Spanish Case.</i>	Semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin perusahaan dapat meningkatkan pendapatannya karena pengendalian dan pengawasan terjadi secara lebih maksimal. Di lain sisi semakin kecil ukuran dewan direksi maka perusahaan dalam meningkatkan pendapatan semakin turun pula.	Pendukung Teori <i>Board of Directors</i>
33.	Cahyati et al (2021)	Pengaruh Rotasi Audit, <i>Audit Tenure</i> , <i>Fee Audit</i> , dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit.	<i>Audit committee</i> atau komite audit merupakan suatu lembaga di dalam perusahaan yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) serta mematuhi peraturan yang ada baik internal maupun eksternal.	Pendukung Teori <i>Audit Committee</i>
34.	Pratomo & Rana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak.	Komite audit lebih lanjut melakukan pengawasan terhadap bentuk kecurangan di perusahaan yang dilakukan pihak-pihak terkait serta mengawasi	Pendukung Teori <i>Audit Committee</i>

			laporan keuangan perusahaan.	
35.	Sari et al (2020)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan.	Komite audit merupakan suatu kelompok khusus yang bergerak independen dalam melakukan pengawasan internal perusahaan atas laporan keuangan, manajemen resiko, penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di perusahaan, dan pelaksanaan audit dimana komite audit sendiri ada untuk memperkuat fungsi dewan komisaris.	Pendukung Teori <i>Audit Committee</i>
36.	Rinta (2021)	Ukuran Dewan Direksi, Aktivitas Komite Audit dan Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba.	Komite audit memiliki tanggung jawab dalam hal akuntabilitas dan kualitas dari laporan keuangan perusahaan.	Pendukung Teori <i>Audit Committee</i>
37.	Nurhayati & Wijayanti (2022)	Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Likuiditas, dan <i>Leverage</i> terhadap Profitabilitas.	Kepemilikan instiusional merupakan suatu keadaan dimana suatu institusi baik itu institusi pemerintah, swasta, asing, maupun masyarakat mempunyai kepemilikan saham atas suatu perusahaan.	Pendukung Teori <i>Institutional Ownership</i>

38.	Maulana (2020)	Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan Jasa Keuangan di Indonesia.	Hal tersebut menyebabkan manajemen akan sebisa mungkin untuk melakukan performa terbaik agar dapat memberikan perusahaan peningkatan dalam hal kinerja maupun keuntungan.	Pendukung Teori <i>Institutional Ownership</i>
39.	Aminah & Wuryani (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2014-2018.	Semakin tinggi kepemilikan institusional di perusahaan dapat mengurangi perilaku buruk seperti kinerja kurang baik, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.	Pendukung Teori <i>Institutional Ownership</i>
40.	Wardhani & Samrotun (2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan.	Adanya kepemilikan institusional mendorong peningkatan pengawasan dan memberikan pengaruh bagi kinerja manajemen.	Pendukung Teori <i>Institutional Ownership</i>
41.	Nasution & Sari (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan ( <i>Firm Size</i> ) dan Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	Ukuran perusahaan sebagai nilai yang menggambarkan seberapa besar jumlah asset yang dimiliki perusahaan.	Pendukung Teori <i>Firm Size</i>
42.	Jufrizen & Fatin (2020)	Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> , <i>Return on Equity</i> , <i>Return on Assets</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Farmasi.	Ukuran perusahaan adalah gambaran mengenai besar kecilnya sebuah perusahaan yang dilihat dari nilai ekuitas, nilai perusahaan	Pendukung Teori <i>Firm Size</i>

			atau jumlah total asset yang perusahaan miliki.	
43.	Windaryani & Jati (2020)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada <i>Tax Avoidance</i> .	Dengan memiliki sumber daya manusia yang banyak, perusahaan memiliki banyak potensi dan keterampilan untuk digunakan bagi kepentingan perusahaan dalam menunjang kinerja perusahaan.	Pendukung Teori <i>Firm Size</i>
44.	Indrayani et al (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Akuntansi Lingkungan, <i>Leverage</i> dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan.	Semakin besar ukuran perusahaan dapat mencerminkan tingkat pendapatan yang baik dan memperlihatkan upaya dari perusahaan untuk berkomitmen memperbaiki kinerja perusahaan.	Pendukung Teori <i>Firm Size</i>
45.	Rahmawati & Nani et al (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tingkat Hutang terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019).	Profitabilitas sebagai cerminan pengelolaan sebuah perusahaan dalam kemampuannya memaksimalkan penggunaan kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba.	Pendukung Teori <i>Profitability</i>
46.	Wulandari & Efendi (2022)	Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan <i>Corporate Social</i>	Profitabilitas merupakan hasil akhir yang menyangkut serangkaian	Pendukung Teori <i>Profitability</i>



		<i>Responsibility</i> sebagai Variabel Moderasi.	peraturan manajemen terkait penyelenggaraan kegiatan operasional dan bagaimana penggunaan dana perusahaan.	
47.	Asyati & Farida (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance, Leverage, Profitabilitas</i> dan Kualitas Audit terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018).	Tinggi rendahnya profitabilitas perusahaan diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat sebuah perusahaan untuk dapat menghasilkan laba perusahaan.	Pendukung Teori <i>Profitability</i>
48.	Almira & Wiagustini (2020)	<i>Return on Asset, Return on Equity, dan Earning per Share</i> Berpengaruh terhadap <i>Return Saham</i> .	ROE yang tinggi mencerminkan perusahaan telah berhasil memaksimalkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dan juga perusahaan berhasil meningkatkan nilai dan kinerjanya.	Pendukung Teori <i>Profitability</i>
49.	Amelia & Sunarsi (2020)	Pengaruh <i>Return on Asset</i> dan <i>Return on Equity</i> terhadap <i>Debt to Equity Ratio</i> pada PT. Kalbe Farma, Tbk.	ROE sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan perusahaan.	Pendukung Teori <i>Profitability</i>